PERAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

Septiyani Dewi Saputri [1], Nurhikmah Rizqianna [2], Tifeni Defa Marliana [3], Azkiya Dwi Ningrum [4], Annisa Hasna Lutfiani [5], Anida Ainur Rahma[6], Siswadi[7]
[1-7]UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[1] 254110406039@mhs.uinsaizu.ac.id, [2] 254110406036@mhs.uinsaizu.ac.id , [3] 254110406044@mhs.uinsaizu.ac.id, [4] 254110406009@mhs.uinsaizu.ac.id , [5] 254110406007@mhs.uinsaizu.ac.id[6] 254110406006@mhs.uinsaizu.ac.id , [7] siswadi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

Education leadership plays an important role in improving human resource quality and strengthening community economic independence. This article examines how educational leaders can connect learning quality, relevant competencies, entrepreneurship, and partnerships with communities and the world of work. The study uses a qualitative library research approach by reviewing literature on educational leadership, human capital, educational quality, innovation, and social capital. Data are analyzed through content analysis and thematic synthesis. The review indicates that education contributes to economic independence when learning develops not only academic knowledge but also practical skills, digital literacy, problem-solving, collaboration, and entrepreneurial capacity. Educational leaders shape this contribution through clear institutional vision, responsive program planning, teacher development, relevant learning experiences, and collaboration with families, local government, community organizations, and business actors. The article proposes a conceptual framework comprising five connected functions: mapping community and learner needs, aligning learning with relevant competencies, developing entrepreneurial and vocational skills, building sustainable partnerships, and evaluating outcomes for continuous improvement. Economic independence should not be understood solely as individual income growth; it also includes the ability to manage resources, make informed economic decisions, create livelihood opportunities, and participate productively in community life. Since this study is based on literature, the framework is conceptual and requires further examination in different educational settings.

Keywords: *educational leadership, human resource quality, economic independence, entrepreneurship, community empowerment.*

ABSTRAK

Kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana pemimpin pendidikan dapat menghubungkan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi yang relevan, kewirausahaan, serta kemitraan dengan masyarakat dan dunia kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui penelaahan literatur tentang kepemimpinan pendidikan, modal manusia, mutu pendidikan, inovasi, dan modal sosial. Data dianalisis melalui analisis isi dan sintesis tematik. Hasil kajian

menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi apabila pembelajaran tidak hanya mengembangkan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis, literasi digital, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kemampuan berwirausaha. Pemimpin pendidikan mengarahkan kontribusi tersebut melalui visi kelembagaan yang jelas, perencanaan program yang responsif, pengembangan kompetensi guru, pengalaman belajar yang relevan, serta kerja sama dengan keluarga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha. Artikel ini merumuskan kerangka konseptual yang mencakup lima fungsi: pemetaan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, penyelarasan pembelajaran dengan kompetensi yang relevan, pengembangan keterampilan vokasional dan kewirausahaan, pembangunan kemitraan berkelanjutan, serta evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Kemandirian ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya, mengambil keputusan ekonomi, menciptakan peluang penghidupan, dan berpartisipasi produktif dalam kehidupan masyarakat. Karena berbasis studi pustaka, kerangka ini bersifat konseptual dan perlu dikaji lebih lanjut pada berbagai konteks pendidikan.

Kata kunci: kepemimpinan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi perubahan teknologi, tuntutan keterampilan kerja, dan dinamika usaha yang terus berkembang. Pendidikan yang bermutu dapat memperluas pilihan hidup, tetapi manfaatnya tidak muncul secara otomatis hanya karena seseorang pernah bersekolah. Pengalaman belajar perlu membekali peserta didik dengan kompetensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, bekerja secara produktif, beradaptasi, dan mengembangkan peluang ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara tepat dalam kehidupan nyata. Penguasaan materi pelajaran tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan literasi digital, komunikasi, kreativitas, pemecahan masalah, disiplin, dan kecakapan bekerja sama. Dalam konteks ekonomi masyarakat, kompetensi tersebut membantu seseorang memasuki dunia kerja,

meningkatkan kualitas usaha, mengelola keuangan, serta merespons perubahan kebutuhan pasar. World Bank (2018) menekankan pentingnya pembelajaran sebagai dasar pembentukan modal manusia; dengan demikian, perhatian terhadap pendidikan tidak cukup berhenti pada partisipasi sekolah, tetapi juga perlu memperhatikan apa yang benar-benar dipelajari dan dapat diterapkan.

Kemandirian ekonomi masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya lapangan kerja atau besarnya pendapatan. Kemandirian juga berkaitan dengan kemampuan mengelola sumber daya, membuat keputusan ekonomi yang bertanggung jawab, mengembangkan usaha, memanfaatkan teknologi, dan membangun jaringan kerja sama. Pendidikan dapat memperkuat kemampuan tersebut apabila materi dan kegiatan belajar terhubung dengan kebutuhan lingkungan. Sebaliknya, pembelajaran yang terlalu jauh dari realitas sosial dan ekonomi berisiko menghasilkan pengetahuan yang sulit diterapkan. Karena itu, relevansi pendidikan perlu dibangun melalui pemahaman terhadap potensi lokal, kebutuhan keterampilan, serta peluang kerja dan usaha di sekitar masyarakat.

Dalam hubungan tersebut, kepemimpinan pendidikan memiliki posisi strategis. Kepala sekolah, kepala madrasah, pimpinan lembaga pelatihan, dan pengelola pendidikan lainnya menentukan arah program, penggunaan sumber daya, pengembangan guru, budaya organisasi, serta pola kerja sama dengan pihak luar. Pemimpin tidak dapat menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung, tetapi dapat menciptakan kondisi pendidikan yang memperkuat kapasitas manusia dan memperluas akses terhadap kesempatan belajar. Peran ini menuntut kepemimpinan yang tidak hanya administratif, melainkan juga visioner, adaptif, inovatif, dan mampu menghubungkan tujuan lembaga dengan kebutuhan masyarakat.

Kepemimpinan visioner diperlukan untuk menerjemahkan tujuan pendidikan ke dalam prioritas yang terarah. Siswadi (2024a) membahas pentingnya kepemimpinan pendidikan visioner dalam menjawab tantangan abad ke-21. Dalam artikel ini, perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan perlunya

pemimpin menetapkan tujuan pengembangan kompetensi yang jelas, menghubungkan kurikulum dengan tantangan masa depan, dan memastikan bahwa program kelembagaan tidak berjalan sebagai kegiatan yang terpisah-pisah. Visi menjadi bermakna ketika diterjemahkan ke dalam perencanaan, pembagian tanggung jawab, dukungan terhadap guru, dan evaluasi yang konsisten.

Selain memiliki visi, pemimpin pendidikan perlu mendorong inovasi pembelajaran dan penguatan budaya mutu. Siswadi (2023) mengulas pendekatan strategis manajemen kepemimpinan untuk mendorong inovasi pembelajaran, sedangkan Siswadi (2025) membahas formulasi kepemimpinan visioner dalam peningkatan budaya mutu pendidikan Islam. Perspektif tersebut relevan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan memberi ruang bagi penerapan pengetahuan. Inovasi bukan sekadar penggunaan perangkat digital, melainkan pembaruan cara belajar agar peserta didik mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan dan pekerjaan.

Kemandirian ekonomi juga membutuhkan hubungan yang kuat antara lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Sekolah atau madrasah dapat membangun kemitraan dengan keluarga, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pelatihan, koperasi, dan organisasi masyarakat untuk memperkaya pengalaman belajar. Kajian tentang kepemimpinan berbasis modal sosial menempatkan kepercayaan, jejaring, dan kolaborasi sebagai sumber daya penting bagi penguatan budaya mutu (Siswadi et al., 2026). Dalam konteks artikel ini, modal sosial dipahami sebagai sarana untuk membuka akses terhadap pengetahuan praktis, pendampingan, pengalaman kerja, serta peluang pengembangan usaha, bukan sebagai pengganti tanggung jawab lembaga pendidikan dan pemerintah.

Namun, hubungan antara pendidikan dan kemandirian ekonomi tidak boleh dipahami secara sederhana. Lulusan yang memiliki kompetensi tetap menghadapi pengaruh kondisi pasar kerja, ketersediaan modal, infrastruktur, akses teknologi, dan peluang usaha.

Oleh sebab itu, pendidikan tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat. Kontribusi lembaga pendidikan terletak pada penguatan kapasitas manusia dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang, sedangkan keberlanjutan hasilnya memerlukan dukungan lingkungan ekonomi dan kebijakan yang memadai.

Berdasarkan persoalan tersebut, pembahasan perlu menghubungkan kepemimpinan, mutu pembelajaran, kompetensi, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kerangka. Pemimpin pendidikan perlu memahami kebutuhan peserta didik serta potensi ekonomi lokal, menyelaraskan program dengan kompetensi yang diperlukan, membangun kemitraan yang memiliki tujuan jelas, dan menilai manfaat program secara berkala. Pendekatan ini menghindari anggapan bahwa keberhasilan cukup diukur dari kelulusan atau terselenggaranya kegiatan kewirausahaan. Hal yang lebih penting adalah apakah pengalaman belajar memperkuat kapasitas peserta didik untuk mengambil keputusan dan bertindak secara produktif.

Celah pembahasan yang menjadi perhatian artikel ini adalah perlunya penjelasan yang lebih terpadu mengenai bagaimana kepemimpinan pendidikan menghubungkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kemandirian ekonomi masyarakat. Kajian kepemimpinan, inovasi pembelajaran, dan budaya mutu memberi landasan penting, tetapi penerapannya perlu dibaca bersama pengembangan keterampilan, kewirausahaan, serta kemitraan lokal. Artikel ini menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan aspek-aspek tersebut sebagai fungsi kepemimpinan yang saling berhubungan, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.

Artikel ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi masyarakat, mengidentifikasi strategi yang dapat dikembangkan lembaga pendidikan, serta merumuskan kerangka konseptual untuk menghubungkan mutu pembelajaran dengan pemberdayaan ekonomi. Pembahasan disusun berdasarkan literatur dan tidak dimaksudkan

sebagai laporan pengukuran dampak ekonomi pada lokasi tertentu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah menelaah gagasan dan temuan terdahulu mengenai kepemimpinan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, mutu pembelajaran, kewirausahaan, serta kemandirian ekonomi masyarakat. Sumber yang digunakan meliputi buku akademik, artikel jurnal, laporan lembaga, dan publikasi yang relevan dengan fokus kajian. Literatur kepemimpinan digunakan untuk menganalisis peran pemimpin dalam menentukan arah dan mengelola perubahan, sedangkan literatur pendidikan dan pembangunan manusia digunakan untuk menjelaskan hubungan kompetensi dengan produktivitas dan peluang ekonomi.

Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan empat tema, yaitu kepemimpinan pendidikan visioner dan inovatif, pembentukan kualitas sumber daya manusia, pendidikan vokasional dan kewirausahaan, serta kemitraan pendidikan dengan masyarakat dan dunia kerja. Sumber dipertimbangkan berdasarkan relevansi isi, kejelasan identitas penulis, tahun publikasi, dan kredibilitas penerbit. Publikasi Siswadi digunakan untuk membangun perspektif kepemimpinan visioner, inovasi pembelajaran, budaya mutu, dan modal sosial; sementara publikasi World Bank digunakan untuk menjelaskan pentingnya pembelajaran dalam pembentukan modal manusia. Sumber-sumber tersebut diperlakukan sebagai bahan analisis, bukan sebagai bukti langsung bahwa suatu program tertentu telah meningkatkan pendapatan masyarakat.

Analisis dilakukan melalui analisis isi dan sintesis tematik. Gagasan utama dari setiap sumber diidentifikasi, kemudian dikelompokkan ke dalam tema kepemimpinan, kompetensi, relevansi pembelajaran, kewirausahaan, kemitraan, dan evaluasi. Hubungan antartema dibandingkan untuk menemukan fungsi kepemimpinan yang dapat menghubungkan pendidikan dengan kemandirian ekonomi. Hasil analisis disusun menjadi kerangka konseptual yang

memuat pemetaan kebutuhan, penyelarasan kompetensi, pengembangan keterampilan produktif, kemitraan berkelanjutan, serta evaluasi dan perbaikan. Karena penelitian berbasis literatur, hasilnya merupakan sintesis analitis dan bukan temuan wawancara atau observasi lapangan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pendidikan dan Pembentukan Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia melalui proses pembentukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Kualitas tersebut tidak cukup dinilai dari lama sekolah atau ijazah yang diperoleh. Pengalaman belajar perlu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep, menerapkannya dalam situasi nyata, bekerja sama, menyampaikan gagasan, dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, mutu pendidikan berkaitan erat dengan kualitas proses belajar dan relevansi kompetensi yang dikembangkan.

World Bank (2018) menempatkan pembelajaran sebagai unsur penting dalam pembangunan modal manusia. Gagasan ini menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan perlu disertai pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks masyarakat, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dapat membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan, menggunakan teknologi, dan mengembangkan pilihan penghidupan. Meski demikian, hubungan antara pendidikan dan hasil ekonomi dipengaruhi pula oleh kondisi pasar kerja, ketersediaan kesempatan, dan dukungan sosial sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa pendidikan secara otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia perlu mencakup kompetensi dasar dan kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi membaca, numerasi, komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi, literasi digital, serta kecakapan mengelola tugas menjadi fondasi untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Keterampilan kewirausahaan, seperti mengenali kebutuhan konsumen, menyusun rencana usaha, menghitung biaya, mengelola risiko, dan memasarkan produk, dapat dikembangkan sesuai usia peserta didik dan konteks lembaga. Pengembangan kompetensi tersebut sebaiknya terintegrasi dalam pembelajaran, bukan hanya disampaikan melalui kegiatan seremonial.

Kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan. Pembelajaran berbasis proyek, praktik, pemecahan masalah lingkungan, kunjungan belajar, dan kerja sama dengan pelaku usaha dapat membantu peserta didik memahami hubungan antara teori dan kebutuhan nyata. Bagi masyarakat yang memiliki potensi lokal di bidang pertanian, kerajinan, jasa, perdagangan, atau industri kreatif, konteks tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran. Namun, potensi lokal perlu dipetakan terlebih dahulu agar kegiatan pendidikan tidak sekadar meniru tren usaha yang belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat.

Karena itu, pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu menggabungkan penguasaan pengetahuan, pembentukan karakter kerja, dan pengalaman penerapan. Kepemimpinan pendidikan berperan dalam menjaga agar kurikulum, pengembangan guru, sarana, dan penilaian mendukung tujuan tersebut. Pemimpin perlu mendorong guru merancang kegiatan belajar yang menantang sekaligus relevan, menyediakan ruang untuk refleksi dan praktik, serta menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran.

3.2. Peran Kepemimpinan Pendidikan dalam Mengarahkan Mutu dan Relevansi Pembelajaran

Kepemimpinan pendidikan berperan menghubungkan visi kelembagaan dengan kebutuhan pengembangan peserta didik dan masyarakat. Pemimpin menetapkan prioritas, mengoordinasikan sumber daya, mendukung guru, serta membangun budaya organisasi yang mendorong perbaikan. Dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia, visi tidak cukup dirumuskan sebagai keinginan menghasilkan lulusan yang unggul. Visi perlu

menjelaskan kompetensi apa yang hendak dikembangkan, bagaimana kompetensi itu dipelajari, dan bagaimana lembaga menilai ketercapaiannya.

Kepemimpinan visioner membantu lembaga melihat kebutuhan kompetensi untuk jangka panjang. Perspektif Siswadi (2024a) dapat dibaca sebagai pijakan untuk mengarahkan perencanaan pendidikan agar tidak hanya mengikuti rutinitas tahunan. Pemimpin perlu menelaah perubahan lingkungan, potensi peserta didik, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan program prioritas, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pemanfaatan sarana pembelajaran.

Peran berikutnya adalah mendorong inovasi pembelajaran yang berorientasi pada hasil belajar. Siswadi (2023) membahas strategi kepemimpinan dalam mendorong inovasi pembelajaran. Dalam penerapannya, inovasi perlu menjawab persoalan pembelajaran yang nyata, misalnya rendahnya keterlibatan peserta didik, keterbatasan pengalaman praktik, atau belum kuatnya hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi dapat mendukung proses tersebut, tetapi keberhasilan inovasi tetap bergantung pada tujuan pedagogis, kesiapan guru, akses peserta didik, dan evaluasi hasil belajar.

Kepemimpinan juga menentukan apakah pengembangan kompetensi menjadi bagian dari budaya mutu atau hanya kegiatan sesaat. Pembahasan Siswadi (2025) mengenai budaya mutu pendidikan Islam relevan untuk menekankan konsistensi perbaikan. Pemimpin dapat membangun forum refleksi guru, mendorong pertukaran praktik baik, menyediakan pendampingan profesional, dan meninjau hasil pembelajaran secara berkala. Budaya mutu tidak hanya terlihat dari dokumen program, tetapi dari kebiasaan menggunakan informasi untuk memperbaiki pembelajaran dan memberi dukungan yang dibutuhkan peserta didik.

Dalam pelaksanaan, pemimpin perlu memberi ruang kepada guru untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi peserta didik tanpa kehilangan tujuan kompetensi. Pembelajaran yang relevan dapat melibatkan studi kasus lokal, proyek kelompok,

simulasi usaha, praktik penggunaan teknologi, dan pemecahan masalah di lingkungan sekitar. Kegiatan semacam itu membantu peserta didik memahami bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk membaca persoalan dan menghasilkan solusi. Pemimpin bertugas memastikan bahwa kegiatan memiliki tujuan belajar, pendampingan, sumber daya, dan mekanisme penilaian yang jelas.

Berdasarkan sintesis tersebut, peran kepemimpinan pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup empat fungsi utama: menetapkan visi dan kompetensi prioritas, memperkuat kapasitas guru, mendorong pembelajaran kontekstual dan inovatif, serta membangun budaya evaluasi. Keempat fungsi saling terkait. Visi tanpa pengembangan guru sulit diwujudkan, inovasi tanpa evaluasi berisiko menjadi kegiatan sesaat, sedangkan budaya mutu tanpa arah kompetensi yang jelas dapat terjebak pada urusan administratif.

3.3. Strategi Kepemimpinan untuk Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Strategi pertama adalah memetakan kebutuhan kompetensi dan potensi ekonomi masyarakat. Pemimpin pendidikan perlu memahami kondisi peserta didik, karakteristik lingkungan, sumber daya lokal, serta peluang dan kendala yang dihadapi masyarakat. Pemetaan dapat dilakukan melalui dialog dengan keluarga, alumni, pelaku usaha, pemerintah desa atau daerah, dan organisasi masyarakat. Informasi tersebut membantu lembaga menentukan apakah pengembangan keterampilan tertentu relevan, sekaligus mencegah program kewirausahaan dirancang hanya berdasarkan asumsi atau tren.

Hasil pemetaan selanjutnya digunakan untuk menyelaraskan program pembelajaran dengan kompetensi yang dibutuhkan. Penyelarasan bukan berarti pendidikan harus tunduk sepenuhnya pada kebutuhan pasar kerja jangka pendek. Lembaga tetap perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi, etika, dan kapasitas belajar sepanjang hayat. Namun, peserta didik juga perlu mendapat pengalaman untuk menerapkan kompetensi tersebut melalui proyek, praktik kerja, simulasi usaha, pengelolaan kegiatan

produktif, atau pemecahan masalah yang berangkat dari kebutuhan lokal.

Strategi kedua adalah mengembangkan literasi ekonomi dan keterampilan kewirausahaan secara terencana. Peserta didik dapat diperkenalkan pada perencanaan keuangan sederhana, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perhitungan biaya, penentuan harga, pelayanan pelanggan, pemasaran, dan penggunaan platform digital secara bertanggung jawab. Program perlu disesuaikan dengan jenjang dan tujuan pendidikan. Kegiatan kewirausahaan tidak semestinya hanya berorientasi pada penjualan produk dalam waktu singkat, tetapi digunakan sebagai proses belajar untuk memahami perencanaan, kerja sama, kualitas, risiko, dan tanggung jawab.

Pengembangan kewirausahaan perlu disertai pendampingan dan refleksi. Pemimpin pendidikan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha belajar memiliki pembagian peran yang jelas, pencatatan yang transparan, standar keamanan, serta evaluasi terhadap proses dan hasil. Jika kegiatan melibatkan dana atau produk peserta didik, pengelolaannya harus akuntabel dan tidak membebani keluarga. Tujuan utamanya adalah membentuk kemampuan mengenali peluang dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, bukan menjanjikan bahwa setiap peserta didik akan menjadi pengusaha.

Strategi ketiga adalah membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan masyarakat dan dunia usaha. Kerja sama dapat berupa narasumber praktisi, kunjungan ke tempat kerja, pendampingan proyek, praktik kerja sesuai ketentuan, pelatihan keterampilan, akses informasi pasar, atau dukungan bagi kegiatan produktif masyarakat. Kemitraan harus memiliki tujuan, pembagian tanggung jawab, jadwal, dan evaluasi yang jelas. Sekolah atau madrasah juga perlu memastikan bahwa kerja sama tidak hanya menguntungkan pihak tertentu dan tetap sejalan dengan tujuan pendidikan.

Perspektif modal sosial dalam kajian Siswadi dan rekan-rekan (2026) membantu menjelaskan pentingnya kepercayaan dan jejaring dalam pengembangan budaya mutu. Dalam konteks kemandirian ekonomi, hubungan antarlembaga dapat memperluas akses terhadap pengetahuan praktis dan sumber daya

yang sulit disediakan sendiri oleh satuan pendidikan. Akan tetapi, jumlah mitra bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kemitraan lebih bermakna apabila berlangsung konsisten, menjangkau kelompok yang membutuhkan, dan menghasilkan pengalaman belajar yang dapat dimanfaatkan peserta didik serta masyarakat.

Strategi keempat adalah memanfaatkan teknologi secara produktif dan inklusif. Literasi digital dapat membantu peserta didik mencari informasi, mempromosikan produk, mengelola komunikasi, dan memahami peluang ekonomi. Namun, penggunaan teknologi perlu disertai pemahaman keamanan digital, etika, perlindungan data, dan kemampuan memeriksa informasi. Pemimpin juga harus memperhatikan perbedaan akses perangkat dan jaringan agar program tidak memperlebar kesenjangan. Alternatif akses dan pendampingan perlu disediakan sesuai kemampuan lembaga dan kondisi peserta didik.

Inovasi pembelajaran sebagaimana dibahas Siswadi (2023) perlu diarahkan pada penguatan kemampuan yang dapat diterapkan, bukan hanya pada penggunaan alat baru. Misalnya, proyek pemasaran digital perlu disertai pembahasan mengenai target pengguna, kualitas produk, biaya, etika promosi, dan evaluasi hasil. Proyek pengembangan produk lokal perlu melibatkan analisis kebutuhan, proses produksi, standar kualitas, dan umpan balik pengguna. Dengan demikian, teknologi dan kewirausahaan menjadi wahana belajar yang membangun kompetensi, bukan sekadar aktivitas tambahan.

Strategi kelima adalah mengevaluasi perubahan kompetensi dan manfaat program secara proporsional. Evaluasi dapat mencakup ketercapaian keterampilan, kualitas proyek, kemampuan bekerja sama, literasi keuangan, keberlanjutan kemitraan, serta umpan balik peserta didik dan mitra. Apabila program mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga juga dapat menelaah indikator yang relevan, seperti keberlanjutan kegiatan produktif atau pemanfaatan keterampilan setelah pelatihan, sepanjang data tersedia dan dikumpulkan secara bertanggung jawab. Indikator tersebut tidak boleh langsung dianggap membuktikan dampak kausal pendidikan terhadap pendapatan.

Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki program. Jika keterampilan yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, lembaga dapat memperbarui materi atau mencari mitra yang lebih relevan. Jika partisipasi rendah, pemimpin perlu menelaah jadwal, biaya, akses, dan dukungan yang dibutuhkan peserta. Siklus pemetaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai proses jangka panjang yang bertumpu pada pembelajaran dan kerja sama, bukan kegiatan sesaat yang dinilai hanya dari jumlah peserta atau produk yang terjual.

3.4. Menghubungkan Mutu Pendidikan dengan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Mutu pendidikan dan kemandirian ekonomi perlu dipahami sebagai dua agenda yang saling mendukung, tetapi tidak identik. Pendidikan yang bermutu memperkuat pengetahuan dan kapasitas manusia, sedangkan kemandirian ekonomi juga dipengaruhi oleh kesempatan kerja, akses permodalan, infrastruktur, kebijakan, dan kondisi pasar. Karena itu, tugas kepemimpinan pendidikan bukan menjanjikan hasil ekonomi secara langsung, melainkan membangun kompetensi dan jejaring yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan secara lebih baik.

Penilaian keberhasilan program perlu melampaui jumlah kegiatan atau banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan. Lembaga perlu menilai apa yang dipelajari, apakah keterampilan dapat diterapkan, bagaimana peserta memecahkan masalah, dan apakah kemitraan memberi pengalaman yang bermakna. Pada program yang lebih panjang, informasi mengenai penggunaan keterampilan setelah lulus dapat menjadi bahan evaluasi tambahan. Namun, perubahan pendapatan atau status pekerjaan harus dibaca dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang turut memengaruhinya.

Kepemimpinan visioner dan budaya mutu yang dibahas Siswadi (2024a; 2025) memberi dasar untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian dari tata kelola. Pemimpin dapat memasukkan pengembangan kompetensi dan hubungan dengan masyarakat ke dalam perencanaan kelembagaan, menetapkan penanggung jawab, menyediakan dukungan yang realistis, dan meninjau

kemajuan secara berkala. Program yang berhasil di satu tempat tidak harus disalin begitu saja ke tempat lain, sebab kebutuhan, sumber daya, dan peluang ekonomi setiap masyarakat dapat berbeda.

Lembaga pendidikan juga tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong kemandirian ekonomi. Sekolah atau madrasah memiliki mandat pendidikan, sementara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, keluarga, dan organisasi masyarakat memiliki peran serta sumber daya yang berbeda. Kemitraan perlu menghormati pembagian tanggung jawab tersebut. Pemerintah tetap berperan dalam penyediaan layanan dan kebijakan, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui informasi kebutuhan kompetensi, pengalaman praktis, dan dukungan pembelajaran yang sesuai.

Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi perlu menghubungkan tiga unsur: data kebutuhan sebagai dasar perencanaan, nilai pendidikan sebagai pedoman pengambilan keputusan, dan pengelolaan yang akuntabel sebagai cara pelaksanaan. Data membantu menentukan program yang relevan; tujuan pendidikan menjaga agar pengembangan ekonomi tidak mengabaikan pembentukan karakter dan pengetahuan dasar; sedangkan tata kelola memastikan sumber daya digunakan secara transparan dan manfaat program ditinjau secara berkala.

3.5. Kerangka Konseptual Kepemimpinan Pendidikan untuk Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan kepemimpinan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kerangka ini merupakan hasil pengembangan analitis dari literatur yang dikaji dan belum dapat diperlakukan sebagai model yang efektivitasnya telah diuji melalui penelitian lapangan. Kerangka tersebut terdiri atas lima fungsi yang saling berhubungan.

Pemetaan kebutuhan dan potensi
Mengidentifikasi kompetensi peserta didik, potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan peluang kerja atau usaha.

↓

Penyelarasan kompetensi pembelajaran
Menghubungkan kurikulum dan pengalaman belajar dengan literasi dasar, keterampilan praktis, digital, sosial, dan pemecahan masalah.

↓

Pengembangan keterampilan produktif
Memberi pengalaman vokasional, literasi ekonomi, kewirausahaan, proyek, praktik, dan pendampingan yang sesuai konteks.

↓

Kemitraan berkelanjutan
Membangun kerja sama dengan keluarga, pemerintah, masyarakat, lembaga pelatihan, alumni, dan pelaku usaha.

↓

Evaluasi dan perbaikan
Meninjau hasil belajar, penerapan kompetensi, kualitas kemitraan, serta kebutuhan perbaikan program.

Prinsip yang melandasi seluruh fungsi: relevansi, inklusi, akuntabilitas, keberlanjutan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Fungsi pertama menempatkan pemetaan kebutuhan sebagai dasar keputusan. Pemimpin perlu mengenali karakteristik peserta didik dan potensi ekonomi lingkungan sebelum menentukan program. Fungsi kedua menerjemahkan hasil pemetaan menjadi tujuan pembelajaran yang jelas. Fungsi ketiga menyediakan kesempatan menerapkan pengetahuan melalui kegiatan produktif dan kewirausahaan. Fungsi keempat memperluas dukungan melalui kemitraan, sedangkan fungsi kelima menilai proses dan hasil untuk memperbaiki program. Setiap fungsi membutuhkan tanggung jawab yang jelas serta penyesuaian terhadap sumber daya lembaga.

Kelima fungsi tersebut tidak harus berjalan secara linier. Hasil evaluasi dapat menunjukkan bahwa kompetensi tertentu perlu diperkuat, mitra perlu diganti, atau potensi ekonomi lokal telah berubah. Karena itu, kerangka ini dipahami sebagai siklus yang memungkinkan lembaga memperbarui pemetaan dan perencanaan secara berkala. Penerapannya juga perlu mempertimbangkan jenjang pendidikan, karakteristik masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan tujuan kelembagaan.

Kontribusi konseptual artikel ini terletak pada penempatan kepemimpinan sebagai penghubung antara mutu pembelajaran dan

penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Pemimpin tidak hanya mengarahkan pencapaian akademik, tetapi juga membangun kondisi agar kompetensi dapat diterapkan melalui pengalaman belajar dan kemitraan. Meski demikian, kerangka ini tidak menyatakan bahwa pendidikan sendirian dapat menyelesaikan persoalan ekonomi. Manfaatnya bergantung pada kualitas pelaksanaan, kesempatan yang tersedia, serta dukungan sosial dan kebijakan yang lebih luas.

D. Kesimpulan

Kepemimpinan pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menetapkan arah pengembangan kompetensi, memperkuat kapasitas guru, mendorong pembelajaran kontekstual, dan membangun budaya mutu. Pendidikan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat ketika pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan relevan dengan kehidupan, pekerjaan, serta potensi lokal. Kontribusi tersebut mencakup penguatan literasi digital, keterampilan praktis, kemampuan memecahkan masalah, literasi ekonomi, dan kapasitas kewirausahaan.

Strategi yang dapat dikembangkan meliputi pemetaan kebutuhan dan potensi lokal, penyelarasan pembelajaran dengan kompetensi yang relevan, pengembangan pengalaman vokasional dan kewirausahaan, pembangunan kemitraan berkelanjutan, serta evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki program. Pelaksanaannya memerlukan kerja sama antara lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Evaluasi perlu memperhatikan hasil belajar dan penerapan kompetensi, tanpa menyimpulkan secara berlebihan bahwa perubahan ekonomi tertentu semata-mata disebabkan oleh pendidikan.

Artikel ini menawarkan kerangka konseptual lima fungsi kepemimpinan untuk menghubungkan kualitas sumber daya manusia dengan kemandirian ekonomi masyarakat. Karena kajian ini menggunakan studi pustaka, kerangka tersebut perlu ditelaah lebih lanjut melalui penelitian lapangan pada berbagai jenis lembaga pendidikan dan karakteristik masyarakat. Penelitian berikutnya

dapat memeriksa bagaimana strategi kepemimpinan dilaksanakan, kompetensi apa yang berkembang, serta kondisi apa yang mendukung atau menghambat penerapannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: BPS.

Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York: Harper & Row.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature, 46(3), 607–668. https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607

Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. New York: Columbia University Press.

OECD. (2012). Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264177338-en

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1–17.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.

UNESCO. (2015). Rethinking Education: Towards a Global Common Good? Paris: UNESCO.

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1

Siswadi. (2023). Pendekatan strategis manajemen kepemimpinan dalam mendorong inovasi pembelajaran. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8(1). https://doi.org/10.23969/jp.v8i01.44175

Siswadi. (2024). Penguatan kepemimpinan pendidikan visioner dalam menjawab tantangan global abad 21. Dalam Kepemimpinan Pendidikan Visioner Berbasis Inovatif dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (hlm. 140–149). https://repository.uinsaizu.ac.id/36434/

Siswadi. (2024). Kepemimpinan pendidikan Islam dalam penguatan karakter disiplin beribadah di era digitalisasi. 9(2), 237–260. https://repository.uinsaizu.ac.id/36492/

Siswadi. (2024). Mengurai problematika masa depan kepemimpinan pendidikan adaptif di era digital. https://repository.uinsaizu.ac.id/

Siswadi. (2024). Paradigma kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong ekoteologi di era disrupsi, 9(3), 506–513. https://repository.uinsaizu.ac.id/